

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Nadir. *Pilkada langsung dan masa depan demokrasi Indonesia*. cetakan ke-1. Malang, tahun 2005.
- Bahder Nasution nasution, *metode penelitian ilmu hukum* cetakan ke 2. Bandung, 2016
- Dahlan Thalib, *Kedaulatan rakyat negara hukum dan konstitusi* cetakan ke-1. Yogyakarta, tahun 2000
- Firdaus arifin, *penjabat kepala daerah*, cetaka ke-1, Yogyakarta, tahun 2019
- Irwansyah. *penelitian hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. cetakan ke 4. Yogyakarta, tahun 2021.
- I Gde Panjtja Astawa. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. cetakan ke-2. Bandung, Tahun 2013.
- Indra Syahril, *Pilkada serentak nasional problematika dan solusi*, Cetakan ke-1 Yogyakarta, tahun 2020
- J. Kaloh. *Kepemimpinan kepala Daerah*. cetakan ke-3. Jakarta, tahun 2014.
- Leonardus H. Simarmata, *Pemilukada*. cetakan ke-1. Jakarta, tahun 2022.
- Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia* cetakan ke-1, Yogyakarta: Interpena tahun 2012
- Syahrudin Nawi, *Negara hukum teori dan praktek*, cetakan ke-1 Yogyakarta Tahun 2016
- Tadjudin Noer Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi* cetakan ke -1 Yogyakarta tahun 2003
- Winarmo. *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta Tahun 2017.
- Yusri munaf, *Hukum administrasi Negara*. cetakan ke-1 Pekanbaru. tahun 2016

Jurnal

- Abustan, Implementasi demokrasi dan legitimasi penjabat kepala daerah di Indonesia, *law reform jurnal*, volume 2 Nomor 3 tahun 2022
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22202>

- Achmad Fauzi, otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16 Nomor 1, Maret 2016
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1130>
- Ahmad Gelora Mahardika, Problematika yuridis pengisian penjabat sementara kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, *jurnal hukum dan perundang-undangan*, volume 2, nomor 2, agustus 2022
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6224>
- Amar Wahyudi, kewenangan penjabat pengganti kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dari perspektif peraturan perundang-undangan, *jurnal mendapo*, volume 3 nomor 3 oktober 2022.
hal.184 <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18714>
- Azkia Namira Trivani, analisis pertimbangan DPR Aceh menolak pilkada serentak tahun 2024, Skripsi fakultas syaria'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry banda Aceh, 2022
<https://repository.arraniry.ac.id/25472/1/Azkia%20Namira%20Trivani%20%20180105032%20%20FSH%20%20HTN%20%20085219229866.pdf>
- Azwir Fahmi Harahap, Tinjauan Hukum pemilihan umum kepala daerah secara serentak di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019
https://repository.unsri.ac.id/11989/3/c.%20RAMA_74201_02011181419037_0027098104_0023018005_01_front_ref.pdf
- Dadan Ramdani, problematika penunjukan penjabat kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, (Yogyakarta : UII, 2022
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40794/20912009.pdf?sequence=1>
- Edi Sumanto "relevansi pemikiran demokrasi Abu'ala al-Maududi dengan Muhammad Natsir" Volume 5 Nomor 1, Tahun 2016
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1124>
- H.M. Thalbah, Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen, *jurnal hukum* volume 16, Nomor 3 tahun 2009
<https://media.neliti.com/media/publications/85218-none-7550fab4.pdf>
- Imran, Pengisian Jabatan Gubernur Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, hal.5 ismed kelibay, *Dinamika pemilihan kepala daerah serentak nasional dalam pemilihan*

umum tahun 2024, jurnal noken, volume 7 nomor 2 juli 2022
<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/1739>

Mafiqur rahman, demokrasi dalam filsafat pendidikan barat islam, *jurnal studi keislaman*, volume 3, Nomor 2, desember 2017
<https://media.neliti.com/media/publications/268477-demokrasi-dalam-filsafat-pendidikan-bara-28db1498.pdf>

Mashuri, partisipasi masyarakat sebagai upaya pembangunan demokrasi, *jurnal kewirausahaan*, volume 13 nomor 2, desember 2014
<https://media.neliti.com/media/publications/220441-partisipasi-masyarakat-sebagai-upaya-pem.pdf>

Meryani, Polemik Hukum penunjukan penjabat (PJ) Kepala Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, *Wajah Hukum*, Volume 7 nomor 2, oktober 2023
<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/viewFile/1333/328>

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983,
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=835974>

Ni'matul Huda, problematika penundaan pemilihan kepala daerah dalam pemilihan umum serentak nasional 2024, *Jurnal Etika dan Pemilu* volume Nomor 7 Juni 2021
<https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/17/20/22>

Nurhazlina Afia, Tinjauan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume X No. 1 Januari – Juli 2023
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34333/32983>

Nur rohim yunus, aktualisasi demokrasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, *jurnal sosio didaktika* volume 2 nomor 2 tahun 2015
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/2815>

- Rahmazani, Problematika pengisian jabatan penjabat kepala daerah di masa transisi pra pilkada 2024. *Jurnal Konstitusi*, volume 2 Nomor 2 juni 2023 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2085>
- Ridwan, pertanggungjawaban public pemerintah dalam prespektif hukum administrasi Negara, *jurnal hukum*, volume 10, nomoe 2, januari 2023 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4770/4212>
- Roihanah, legitimasi dan komunikasi kebijakan, *jurnal education and development*, volume nomor 3, September 2022 <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3832>
- Rusdan arifin al mugni, *politik hukum penentuan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat*, jurnal Islamic konstitusional law, volume 1 nomor 2 juli 2023 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/conslr/article/download/33936/12544>
- Samsuri, Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, *Jurnal ilmu multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, Juli-September 2023 <https://greenpub.org/JIM/article/view/283>
- Shinta Dwi Kusniawati, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam prespektif Fiqh Siyasah, skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019 http://digilib.uinsa.ac.id/33628/2/Shinta%20Dwi%20Kusniawati_C05215041.pdf
- Zulfi Rifki Habibi, Analisis yuridis terkait peroidesasi masa jabatan anggota dewan perwakilan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, fakultas hukum, universitas jambi <https://repository.unja.ac.id/58424/5/Bab%201.pdf>

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Repunlik Indonesia

Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No, 75, 1959)

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, No, 5679)

-----, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia, No 5898)

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota

Internet

<https://rm.id/baca-berita/pemilu/169357/membahas-kekosongan-dalam-politik>, Akses 25 Agustus 2023, Pukul 17.00 WIB

willia wahyuni, perbedaan pejabat dan pejabat dalam pemerintahan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pejabat-dan-pejabat-dalam-pemerintahan-lt627ddf53dd0ed/> diakses pada 1 april 2024